

## NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : K1136/MOV/INT/Des/2023  
Nomor : 9 Tahun 2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**LAODE M. SYARIF**  
**DIREKTUR EKSEKUTIF KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN**  
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN**

dan

**SARAH SADIQA**  
**Pit. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH**  
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama secara sinergis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja antara pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Jakarta, 27 Desember 2023

**KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN  
DIREKTUR EKSEKUTIF,**

ttd

**LAODE M. SYARIF**

Jakarta, 19 Desember 2023

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
Pit. SEKRETARIS UTAMA,**

ttd

**SARAH SADIQA**

## LAMPIRAN

NO.	PROGRAM KERJA SAMA LKPP DAN KEMITRAAN	UNIT ORGANISASI
<b>KEPEMILIKAN MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP)</b>		
<b>Dukungan untuk LKPP:</b>		
1	a. Dukungan teknis melalui Penyediaan Konsultan <i>Information Technology</i> (IT) untuk pengembangan alat analisis untuk meningkatkan kemampuan sistem <i>e-procurement</i> dalam mengidentifikasi <i>Beneficial Owners</i> yang sama di perusahaan yang berbeda.	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
	b. Pengembangan panduan teknis dan fungsional teknologi informasi untuk peningkatan/pemutakhiran sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
	c. Dukungan untuk penyusunan panduan kewajiban pendaftaran <i>Beneficial Ownership</i> oleh vendor dalam pendaftaran <i>e-tender/e-catalogue</i> dan <i>e-purchasing</i> dan <i>content media campaign</i> .	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
<b>INTEROPERABILITAS DATA</b>		
<b>Dukungan untuk LKPP:</b>		
2	a. Penyediaan konsultan teknis untuk mengembangkan fitur dan panduan awal spesifikasi teknis/fungsional <i>Application Programming Interface (API) Gateway</i> yang mengatur akses <i>API</i> , konten yang tersedia, dan hal-hal lain yang terkait dengan <i>API</i> sesuai dengan kebutuhan.	1. Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan 2. Direktorat Sistem Pengadaan Digital 3. Direktorat Pasar Pengadaan Digital
	b. Integrasi/akses LKPP pada sistem pendaftaran perusahaan di sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui fasilitasi <i>multistakeholder workshop</i> , dan menyediakan konsultan teknis untuk menyusun spesifikasi teknis/fungsional untuk setiap solusi terkait teknologi informasi yang dibutuhkan.	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
<b>EVALUASI KINERJA</b>		
<b>Dukungan untuk LKPP:</b>		
3	Dukungan penyusunan Kajian dan Rekomendasi Kebijakan tentang Pembaruan Indikator Penilaian Kinerja Vendor yang dapat Diverifikasi, obyektif dan sesuai dengan Praktek Terbaik dari Negara-Negara Lain.	1. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 2. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

KETERLIBATAN PUBLIK			
Dukungan untuk LKPP:			
4	a.	Mendorong pembentukan dan penguatan kapasitas komunitas muda "Youth Integrity Center" sebagai kanal independen pemantau integritas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di level provinsi. Hasil pemantauan <i>Youth Integrity Center</i> akan menjadi bahan advokasi perbaikan kebijakan perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada level daerah (provinsi).	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	b.	Integrasi <i>Open Tender</i> dengan <i>e-Pengaduan</i> , termasuk mendorong <i>Open API</i> untuk <i>e-pengaduan</i> .	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
	c.	Kajian Pengembangan Transformasi Digital pada Layanan Penanganan Permasalahan Hukum (Pemberian Nasihat dan Pendapat Hukum, Penyelesaian Sengketa Kontrak, Pengaduan dan Pemberian Keterangan Ahli).	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

**KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN  
TATA PEMERINTAHAN  
DIREKTUR EKSEKUTIF,**

ttd

**LAODE M. SYARIF**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
Plt. SEKRETARIS UTAMA,**

ttd

**SARAH SADIQA**